



RABU, 4 JULI 2018

SUMBER BERITA

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
X	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Kasus TPP Seluma Tetap Berlanjut

RBI, BENGKULU - Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu, hingga saat ini terus melakukan Penyelidikan secara mendalam terhadap kasus dugaan korupsi Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai

(TPP) di lingkup Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Seluma tahun 2017. Kendati sekarang pada kasus itu ada informasi 4 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengembalikan temua sekitar Rp 2,7 Miliar. Na-

mun pengembaliar itu sama sekali tidak menghentikan proses Penyelidikan. Hal itu ditegaskan Aspidus Kejati Bengkulu, Hendri Nainggolan SH, MH.

BACA HALAMAN II..

SAMBUNGAN HAL I...

Kenapa penyidik tetap bersikukuh untuk melanjutkan perkara itu, menurutnya karena dalam perkara itu sudah jelas ada dugaan pelanggaran administrasi pada pemberian TPP.

"Ya, kami tegaskan, pengembalian itu tidak mempengaruhi proses penyelidikan kita. Karena disitu sudah jelas terjadi pelanggaran administrasi, nantilah kita lihat bagaimana selanjutnya," pungkas Hendri kemarin.

Sebelumnya, Hendri juga pernah menegaskan, sekarang ini pihaknya masih mengkaji dan terus berkoordinasi dengan pihak biro

hukum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait dengan masalah aturan pengucuran dana TPP itu. Apabila pengucuran dana TPP itu nantinya menyalahi aturan kasus ini langsung dinaikkan ke tingkat Penyelidikan.

"Sekarang ini kita belum tahu bagaimana hasil koordinasi tim dengan biro hukum Kemendagri. Kita masih menunggu itu," kata Hendri.

Untuk diketahui, selama proses Penyelidikan penyidik Kejati Bengkulu, sudah memanggil beberapa orang pejabat di Lingkup Pemda Kabupaten Seluma yang dianggap mengetahui masalah pembayaran besaran TPP tersebut. Diantaranya yang sudah dimintai keterangan yaitu, Asisten

I Pemda Kabupaten Seluma, Kabid DPPKAD pada Pemda Kabupaten Seluma.

Diketahui juga, Perkaraan yang diduga merugikan negara ini dibidik Kejati setelah menerima laporan dari masyarakat, bahwa anggaran untuk TPPP di Kabupaten Seluma untuk satu tahun sebesar Rp 50 Miliar. Besaran TPP tersebut diduga tidak sesuai dengan beban kerja ASN pada Pemda Kabupaten Seluma. Hasil Penyelidikan sementara ini rincian besaran pembayaran TPP itu, untuk pejabat sekelas Kabid dan Kabag menerima Rp 16 Juta hingga Rp 12 Juta per bulan, dengan besaran pembayaran itu, kuat dugaan tidak ada dasar dan dan menyalahi aturan.(ide)